

PENGARUH SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH, KONFLIK PERAN, DAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN TERHADAP EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN

Ni Nyoman Sri Paramita¹
I Ketut Budiarta²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia
e-mail: ninym.s.paramita@gmail.com / Telp: +6281 35 33 91 793

ABSTRAK

Sistem pengendalian manajemen merupakan suatu proses yang digunakan untuk meyakinkan bahwa sumber daya yang dimiliki oleh suatu entitas telah digunakan secara efektif dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sistem informasi keuangan daerah, konflik peran, dan lingkungan pengendalian terhadap efektivitas sistem pengendalian manajemen. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai negeri sipil yang menempati bagian keuangan di SKPD Kabupaten Gianyar. Pemilihan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dan diperoleh sebanyak 125 responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa variabel yang berpengaruh positif signifikan terhadap efektivitas sistem pengendalian manajemen adalah sistem informasi keuangan daerah dan lingkungan pengendalian. Sedangkan variabel yang berpengaruh negatif signifikan adalah konflik peran.

Kata kunci: Sistem Informasi Keuangan Daerah, Konflik Peran, Lingkungan Pengendalian, Efektivitas Sistem Pengendalian Manajemen

ABSTRACT

Management control system is a process used to ensure that the resources dimiliki by an entity has been used effectively and efficiently. This study aimed to examine the effect of regional financial information system, konflik role and effectiveness of the control environment of the management control system. The population in this study were all civil servants who occupy part on education finance in Gianyar regency. The selection of the sample using purposive sampling technique and obtained as many as 125 respondents. The data analysis technique used is multiple linear regression analysis. The results of this study variables membuktikan that significant positive effect on the effectiveness of the management control system is a regional financial information system and control environment. While the variables that are significant negative effect of role conflict.

Keywords: Regional Finance Information System, Role Conflict, Environmental Control, Management Control System Effectiveness

PENDAHULUAN

Sejak otonomi daerah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka

daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai daerah otonom memiliki pemerintahan daerah yang melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan daerah, yakni Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menjelaskan bahwa otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam arti daerah telah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar pemerintah pusat yang telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2009, hal ini akan mempengaruhi prinsip pengelolaan, mekanisme penyusunan, pelaksanaan dan penatausahaan, pengendalian dan pengawasan, serta pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Persaingan dalam era globalisasi saat ini memberikan dampak bagi manajemen dimana manajemen dituntut untuk bekerja secara efektif dan efisien dalam menjalankan aktivitasnya agar dapat mencapai tujuan. Pencapaian tujuan dalam suatu entitas, dalam hal ini entitas adalah pemerintah daerah, bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan, maka dari itu diperlukan strategi-strategi yang dijalankan melalui kegiatan pemerintahan yang nantinya akan membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah itu sendiri. Agar berhasil mengimplementasikan strategi dengan baik maka diperlukan sistem pengendalian manajemen (*management control system*) yang didefinisikan sebagai suatu proses dimana manajer organisasi mempengaruhi anggota-anggota organisasi lainnya untuk mengimplementasikan strategi-strategi organisasi (Anthony, 2000:6).

Sistem pengendalian manajemen memiliki lingkup yang sangat luas. Sistem pengendalian manajemen atau yang biasa disebut SPM dirancang tidak

hanya untuk kepentingan pengendalian formal, namun digunakan pula untuk meningkatkan pengendalian diri, budaya, sosial, dan stratejik. Sistem pengendalian manajemen dalam pemerintah daerah bermanfaat untuk pengendalian tugas untuk memastikan kinerja yang efektif. Selain itu, pengendalian manajemen merupakan proses untuk memotivasi dan memberi semangat kepada orang-orang yang melakukan aktivitas atau kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan. Efektivitas diartikan sebagai kemampuan suatu unit atau entitas untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Menurut Supriyono (1999: 36), dalam penerapan sistem pengendalian manajemen terdapat unsur-unsur yang terbagi dalam kelompok struktur dan proses. Yang termasuk dalam kelompok struktur adalah:

1. Struktur organisasi
2. Aliran informasi
3. Pendelegasian wewenang

Yang termasuk dalam kelompok proses adalah:

1. Penyusunan anggaran
2. Pelaporan dan analisis

Pengendalian manajemen diperlukan untuk menjamin bahwa strategi suatu organisasi telah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pengendalian manajemen tersebut meliputi perencanaan, koordinasi, komunikasi informasi, pengambilan keputusan, motivasi, pengendalian dan penilaian kinerja. Beberapa faktor yang memperkuat sistem pengendalian yaitu harus didukung oleh teknologi yang memadai dan manajemen sumber daya manusia. Faktor teknologi meliputi sistem

informasi, dalam konteks penelitian ini adalah sistem informasi keuangan daerah. Faktor sumber daya manusia meliputi konflik peran dan motivasi yang dialami individu yang dapat mempengaruhi efektivitas sistem pengendalian manajemen.

Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan memerlukan sumber daya manusia dan sumber pembiayaan yang memadai, serta dilengkapi dengan berbagai sarana penunjang lainnya seperti sistem informasi akuntansi. Akuntansi merupakan bagian dari sistem informasi yang memiliki posisi penting dalam proses administrasi di pemerintahan daerah, terutama dalam mengatur perencanaan, pengaturan, dan pengawasan (Alshbiel dan Al-Awaqleh, 2011). Implementasi sistem informasi akuntansi di lembaga publik akan memungkinkan kesadaran masalah organisasi, strategi dan kebijaksanaan untuk mencapai tujuan yang diusulkan dan pemanfaatan dana publik (Coman dan Uta, 2011). Akuntansi digunakan sebagai alat untuk mengolah data akuntansi dan keuangan, sehingga dibutuhkan suatu sistem informasi agar dapat menyampaikan informasi tersebut kepada pihak yang membutuhkan. Sistem informasi keuangan daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 adalah sebuah sistem yang mendokumentasikan, menadministrasikan, serta mengolah data keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi sebuah informasi yang disajikan kepada para penggunanya sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban oleh pemerintah daerah.

Pemerintah daerah memiliki sistem khusus untuk mengatur kegiatan operasi keuangannya, yaitu Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA).

SIMDA ini merupakan sebuah aplikasi sistem informasi keuangan daerah yang dirancang oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Permendagri tersebut menjelaskan siklus keuangan daerah mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, penatausahaan serta akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Aplikasi SIMDA merupakan alat yang dikembangkan dengan tujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan secara efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penggunaan aplikasi ini sangat diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dengan baik dan menyajikan laporan keuangan dengan wajar, mengingat banyaknya peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Program aplikasi SIMDA ini dimaksudkan untuk membantu pengelolaan keuangan daerah baik di tingkat SKPKD (sebagai entitas pelaporan), maupun di tingkat SKPD (entitas akuntansi). Dengan adanya program ini diharapkan dapat memberi manfaat lebih kepada pemerintah daerah terutama dalam penyusunan anggaran.

Sumber daya manusia merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan kegiatan atau aktivitas suatu entitas. Setiap orang memiliki harapan yang berbeda untuk aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan peran yang mereka jalankan. Perbedaan harapan ini akan mengakibatkan tekanan pada pemegang peranan untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik antara satu dengan yang lain. Hal inilah yang memicu timbulnya konflik peran, dimana pelaksanaan kegiatan dengan

satu tekanan dapat menyulitkan hal yang lain dengan tekanan yang menyertainya. *Role conflict* dan *role ambiguity* pada pekerjaan mengarah kepada tingkah laku disfungsional dalam pekerjaan, seperti ketidakpuasan kerja, kecenderungan untuk meninggalkan organisasi dan komitmen yang rendah terhadap organisasi itu sendiri.

Peran oleh Luthans (2001:407) didefinisikan sebagai suatu posisi yang memiliki harapan yang berkembang dari norma yang dibangun. Seorang individu seringkali memiliki peran ganda (*multiple roles*), karena selain sebagai karyawan atau pegawai misalnya, seseorang juga memiliki peran dalam keluarganya atau di lingkungannya dan lain-lain. Peran-peran ini seringkali memicu timbulnya konflik dalam diri seseorang maupun dalam pekerjaannya. Menjalani dua peran sekaligus, sebagai seorang karyawan sekaligus peran dalam keluarga atau di lingkungan, tidaklah mudah. Karyawan atau pegawai yang sudah menikah dan punya anak-anak memiliki peran dan tanggung jawab yang lebih berat dibandingkan dengan karyawan atau pegawai yang masih lajang. Konflik antara pekerjaan dengan keluarga menjelaskan terjadinya benturan antara tanggung jawab pekerjaan atau tanggung jawab keluarga (Frone dan Cooper, 1994). Dengan adanya konflik tersebut maka akan dapat mengganggu kegiatan dan konsentrasi dalam pekerjaannya.

Kondisi seperti di atas dapat memicu terjadinya konflik, baik dalam organisasi swasta maupun organisasi publik, dalam penelitian ini adalah SKPD Kabupaten Gianyar. Konflik-konflik ini apabila tidak diatasi dan ditangani dengan baik, maka akan menimbulkan dampak bagi pencapaian tujuan SKPD itu sendiri.

Misalnya adalah rendahnya kinerja pegawai, meningkatnya keinginan untuk keluar dari pekerjaannya, dan menurunnya komitmen terhadap organisasi itu sendiri (Boles, Howard dan Donofrio dalam Azazah Indriyani, 2009). Selain memberikan dampak bagi SKPD, konflik peran ini juga akan mempengaruhi pegawai, karena mereka dalam keadaan yang mengalami tekanan.

American Institute of Certified Public Accounting dalam Baridwan (2005:267) mengungkapkan bahwa pengendalian intern meliputi struktur organisasi dan semua cara serta alat-alat yang dikoordinasikan dan digunakan di dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik organisasi, memeriksa kebenaran data akuntansi, meningkatkan efisiensi dalam operasi, dan membantu dipatuhinya kebijakan manajemen yang ditetapkan. Dalam pengendalian intern atau pengendalian manajemen diperlukan lingkungan pengendalian yang memadai agar dapat membentuk disiplin dan struktur dalam perusahaan.

Menurut Guy *et. al*, lingkungan pengendalian adalah keseluruhan sikap, kesadaran, kebijakan dan tindakan pimpinan, manajemen, pegawai, serta pihak-pihak lainnya mengenai pentingnya pengendalian itu sendiri dan penekanan yang diberikannya dalam sebuah organisasi, baik organisasi sektor publik maupun swasta. lingkungan pengendalian menentukan kualitas entitas dengan mempengaruhi kesadaran akan pengendalian dari orang-orang di dalamnya. Hal tersebut dijadikan sebagai pondasi kedisiplinan dan struktur dari semua komponen pengendalian lainnya. Maka dari itu lingkungan pengendalian menjadi variabel

yang relevan untuk diteliti pengaruhnya terhadap efektivitas sistem pengendalian manajemen di Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar.

Berdasarkan latar belakang dan kajian pustaka yang mendukung penelitian, maka hipotesis yang dapat disusun yaitu:

H₁ : Sistem informasi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap efektivitas sistem pengendalian manajemen.

H₂ : Konflik peran berpengaruh negatif terhadap efektivitas sistem pengendalian manajemen.

H₃ : Lingkungan pengendalian berpengaruh positif terhadap efektivitas sistem pengendalian manajemen.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Gianyar dengan mengambil subjek Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Objek dari penelitian ini adalah sistem informasi keuangan daerah, konflik peran dan lingkungan pengendalian yang dikaitkan dengan efektivitas sistem pengendalian manajemen Pemerintah Kabupaten Gianyar.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja di SKPD Kabupaten Gianyar. Adapun teknik penentuan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan *purposive sampling*, dimana sampel ditentukan dengan pertimbangan atau tujuan tertentu. Berdasarkan metode penentuan sampel tersebut, maka kriteria penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Responden bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di SKPD Kabupaten Gianyar;
- 2) Responden menempati bagian keuangan di SKPD Kabupaten Gianyar.

Roscoe dalam Sekaran (2006: 160) memberikan saran mengenai ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai dengan 500. Jika dalam penelitian akan menggunakan analisis dengan *multivariate* (korelasi atau regresi berganda misalnya), maka jumlah anggota sampel minimal 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini jumlah indikator yang digunakan adalah sebanyak 12, maka jumlah sampel adalah 120 orang responden.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan instrumen kuesioner yang disebarakan secara langsung kepada responden untuk dijawab sendiri. Untuk mengetahui apakah kuesioner layak digunakan sebagai instrumen penelitian, maka akan digunakan uji validitas dan uji reliabilitas.

Model analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis linear berganda (*Multiple Linear Regression Analysis*). Analisis regresi linear berganda merupakan model analisis untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas (sistem informasi keuangan daerah, konflik peran dan lingkungan pengendalian) dengan variabel terikat (efektivitas sistem pengendalian manajemen Pemerintah Kabupaten Gianyar). Sebelum dianalisis regresi, harus dilakukan uji asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui bahwa model regresi yang dibuat terbebas dari masalah normalitas, multikolenieritas, heteroskedastisitas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kuesioner yang disebar ke responden sebanyak 125 kuesioner dan yang kembali sebanyak 125. Tidak terdapat kuesioner yang digugurkan, sehingga secara keseluruhan jumlah kuesioner yang layak digunakan untuk dianalisis adalah sebanyak 125 kuesioner. Hasil uji validitas bisa dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1
Uji Validitas

Variabel	Instrumen	Pearson Correlation
Sistem Pengendalian Manajemen (Y)	Y1.1 - Y1.7	0,642 - 0,850
Sistem Informasi Keuangan Daerah (X1)	X1.1 - X1.8	0,671 - 0,831
Konflik Peran (X2)	X2.1 - X2.5	0,334 - 0,794
Lingkungan Pengendalian (X3)	X3.1 - X3.12	0,406 - 0,833

Sumber: Data Primer Diolah, 2014

Berdasarkan Tabel 1 bisa dilihat bahwa nilai *Pearson Correlation* seluruh variabel berada diatas 0,30. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh instrumen variabel telah valid. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2.
Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha
Sistem Pengendalian Manajemen (Y)	0,841
Sistem Informasi Keuangan Daerah (X ₁)	0,881
Konflik Peran (X ₂)	0,624
Lingkungan Pengendalian (X ₃)	0,849

Sumber: Data primer Diolah, 2014

Dari Tabel 2 bisa dilihat bahwa nilai *Cronbach Alpha* seluruh variabel berada di atas 0,60. Hal ini berarti bahwa seluruh instrumen telah reliabel.

Hasil uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas) dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3.
Uji Asumsi Klasik

Variabel	Normalitas	Multikolinearitas	Heteroskedastisitas
----------	------------	-------------------	---------------------

		<i>Tolerance</i>	VIF	
Sistem Informasi Keuangan Daerah (X_1)		0,935	1,069	0,459
Konflik Peran (X_2)	0,119	0,935	1,070	0,950
Lingkungan Pengendalian (X_3)		0,994	1,007	0,132

Sumber: Data Diolah, 2014

Hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* (normalitas) dalam penelitian ini menunjukkan bahwa data telah terdistribusi secara normal. Hal ini ditunjukkan pada Tabel. 3. yang menunjukkan bahwa nilai Asymp. sig (2-tailed) ketiga persamaan tersebut lebih besar dari $\alpha = 0,05$.

Hasil uji multikolinieritas yang ditunjukkan pada Tabel 3 memberikan hasil nilai *tolerance* untuk masing masing variabel bebas lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF untuk masing-masing variabel lebih kecil dari 10. Maka ini berarti dalam model regresi tidak terjadi multikolinieritas.

Pada uji heteroskedastisitas, metode pengujian yang digunakan adalah uji statistik *Glejser*. Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat bahwa semua variabel bebas memiliki nilai signifikansi $> 0,05$ maka ini berarti pada model regresi tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Analisis regresi linear berganda merupakan model analisis untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas (sistem informasi keuangan daerah, konflik peran dan lingkungan pengendalian) dengan variabel terikat (efektivitas sistem pengendalian manajemen Pemerintah Kabupaten Gianyar). Penyelesaian model persamaan regresi linear berganda akan dilakukan dengan bantuan komputer melalui program *Statistical Package for Social Science* (SPSS). Hasil analisis regresi linear berganda dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4.
Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	25,158	3,185		7,9	0,000
Sistem Informasi Keuangan Daerah (X ₁)	0,169	0,067	0,175	2,539	0,012
Konflik Peran (X ₂)	-0,792	0,097	-0,563	-8,156	0,000
Lingkungan Pengendalian (X ₃)	0,141	0,041	0,232	3,458	0,001
Adjusted R²					0,447
F_{hitung}					34,443
Sig. F					0,000

Sumber: Data Primer Diolah, 2014

Hasil uji F (*F test*) menunjukkan bahwa nilai F_{hitung} sebesar 34,443 dengan signifikansi F atau *P value* 0,000 yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$, ini berarti model yang digunakan pada penelitian ini adalah layak. Hasil ini memberikan makna bahwa ketiga variabel bebas mampu memprediksi atau menjelaskan fenomena efektivitas sistem pengendalian manajemen pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar.

Pada Tabel 4 dapat dilihat besarnya *Adjusted R²* adalah 0,447. Ini berarti variasi efektivitas sistem pengendalian manajemen dapat dijelaskan oleh variasi sistem informasi keuangan daerah, konflik peran dan lingkungan pengendalian sebesar 44,7 persen, sedangkan sisanya sebesar 55,3 dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini

Dari hasil perhitungan yang ditunjukkan pada Tabel 4 diketahui bahwa nilai $\beta_1 = 0,169$ dengan tingkat signifikansi t sebesar 0,012 yang berarti di bawah nilai $\alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel sistem informasi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas sistem

pengendalian manajemen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi penggunaan sistem informasi keuangan daerah maka semakin tinggi pula efektivitas sistem pengendalian manajemen pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar. Sebaliknya, apabila semakin rendah penggunaan sistem informasi keuangan daerah, maka semakin rendah pula efektivitas sistem pengendalian manajemen. Sistem informasi keuangan daerah memiliki kemampuan untuk meningkatkan keefektifitasan dalam proses sistem pengendalian manajemen.

Dari hasil perhitungan yang ditunjukkan pada Tabel 4 diketahui bahwa nilai $\beta_2 = -0,792$ dengan tingkat signifikansi t sebesar $0,000$ yang berarti bahwa di bawah nilai $\alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel konflik peran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap efektivitas sistem pengendalian manajemen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi konflik peran yang dialami oleh seorang pegawai maka semakin rendah efektivitas sistem pengendalian manajemen pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar. Sebaliknya, apabila semakin rendah konflik peran yang dialami oleh seorang pegawai maka semakin tinggi efektivitas Konflik peran muncul karena adanya ketidaksesuaian antara harapan yang disampaikan kepada individu di dalam organisasi dengan orang lain di dalam dan di luar organisasi sistem pengendalian manajemen pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar.

Dari hasil perhitungan yang ditunjukkan pada Tabel 4 diketahui bahwa nilai $\beta_3 = 0,141$ dengan tingkat signifikansi t sebesar $0,001$ yang berarti di bawah nilai $\alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel lingkungan pengendalian berpengaruh positif terhadap efektivitas sistem pengendalian manajemen. Hasil

penelitian ini menunjukkan bahwa semakin baik lingkungan pengendalian maka semakin tinggi efektivitas sistem pengendalian manajemen pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar. Sebaliknya, apabila semakin buruk lingkungan pengendalian maka semakin rendah efektivitas sistem pengendalian manajemen pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar. Lingkungan pengendalian merupakan dasar dari kedisiplinan dan struktur dari komponen sistem pengendalian manajemen.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa variabel sistem informasi keuangan daerah dan lingkungan pengendalian berpengaruh positif terhadap efektivitas sistem pengendalian manajemen pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar. Variabel konflik peran berpengaruh negatif terhadap efektivitas sistem pengendalian manajemen pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar.

Berdasarkan simpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: (1) Segenap pegawai sebaiknya menguasai SIMDA yang digunakan dalam Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar, karena dengan penggunaan SIMDA dapat meningkatkan efektivitas sistem pengendalian manajemen. (2) Peran setiap individu dalam setiap SKPD sebaiknya diperjelas dengan pelimpahan tugas dan wewenang yang sesuai dengan setiap kemampuan individu yang bersangkutan untuk mengurangi terjadinya konflik peran. (3) Aturan-aturan tertulis maupun lisan sebaiknya dikomunikasikan kepada seluruh pegawai untuk meningkatkan kedisiplinan dalam bekerja. Kedisiplinan ini akan

menciptakan lingkungan pengendalian yang baik, sehingga sistem pengendalian manajemennya akan semakin efektif. (4) Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah untuk mengembangkan variabel-variabel lain yang masih erat hubungannya yang terkait dengan sistem pengendalian manajemen, misalnya motivasi, gaya manajemen, budaya organisasi, dan lain-lain.

Keterbatasan dalam penelitian ini antara lain penelitian dilakukan hanya sebatas Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar, sehingga hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan. Selain itu, nilai *Adjusted R Square* yang cukup kecil yaitu 0,447. Hal ini memiliki arti bahwa berarti variasi efektivitas sistem pengendalian manajemen dapat dijelaskan oleh variasi sistem informasi keuangan daerah, konflik peran dan lingkungan pengendalian sebesar 44,7 persen, sedangkan sisanya sebesar 55,3 dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

REFERENSI

- Alshbiel, Seif Obeid & Al-Awaqleh, Qasim Ahmad. 2011. Factors Affecting the Applicability of the Computerized Accounting System. Dalam *International Research Journal of Finance and Economics ISSN 1450-2887 Issue 64 (2011)*. h:37-53.
- Baridwan, Zaki. 2005. *Intermediet Accounting*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Coman, Narcisa Andrei & Uta, Tatiana. 2011. Particulaities of the Accounting Information System in the Scientific Academic Institution from Romania. Dalam *Procedia Social and Behavioral Sciences 15 (2011)*, h:2449-2453.
- Frone, M. R., Russel, M., & Cooper, M. L. 1994. Relationship between Job and Family Satisfication: Causal or Noncausal Covariation? *Journal of Management*, 20: 565-579.
- Guy, Dan M. et al. Penerjemah: Sugiyarto. 2002. Edisi 5. *Auditing Jilid I*. Jakarta: Erlangga.
- Indriyani, Azazah. 2009. Pengaruh Konflik Peran Ganda dan Stres Kerja terhadap Kinerja Perawat Wanita Rumah Sakit. *Tesis*. Semarang.
- Luthans, Fred. 2006. *Perilaku Organisasi*. Cetakan ke-10. Penerbit Andi: Yogyakarta.
- Republik Indonesia. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat daerah Kabupaten Gianyar.
- _____. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- _____. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah.
- _____. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Edisi 4. Salemba Empat: Jakarta